

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA ANGGARAN REALISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

IKHSAN ABDUL RAHMAN

185310402

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ikhsan Abdul Rahman
NPM : 185310402
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Efi Susanti, SE., M.Acc

Mengetahui:

DEKAN

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan
Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Ikhsan Abdul Rahman
NPM : 185310402
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Yusrawati, SE., M.Si.

2. Iyoyo Dianto, SE., M.Si.

Tanda Tangan

(Signature)

(Signature)

Pembimbing

Efi Susanti, SE., M.Acc.

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1

(Signature)

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

الجامعة الإسلامية الرياوية


Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674681 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ikhsan Abdul Rahman
NPM : 185310402
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Sponsor : Efi Susanti, SE., M.Acc.
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
1	22 April 2022	perbaiki lagi	
2	14 Mei 2022	lhm, permasalahan di outcome blom kelihatan bab 2 tambahkan konsep lg bab 3 sumber dan jenis data diperbaiki	
3	23 Mei 2022	permasalahan yang dikemukakan blom tepat, terutama berkaitan dengan outcome,	
4	25 Mei 2022	lanjutkan buat ppt	
5	05 Agustus 2022	teknis penulisan, dan struktur organisms	

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
6	11 Agustus 2022	persiapkan semhas	

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Wakil Dekan I

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.
NPK. 19790914 200501 2 002



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 921/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 22 Agustus 2022, Maka pada Hari Selasa 23 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Ikhsan Abdul Rahman |
| 2. NPM | : 185310402 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. |
| 5. Tanggal ujian | : 23 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B+) 79,66 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Efi Susanti, SE., M.Acc
2. Yusrawati, SE., M.Si
3. Dr. Iyoyo Dianto, SE., M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

Notulen

1. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak


(.....)

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,


Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 921/ Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

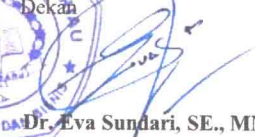
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Ikhsan Abdul Rahman
N P M : 185310402
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Sjabatan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc	Lektor III/b	Materi	Ketua
2	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Dr. Iyoyo Dianto, SE., M.Si	Lektor III/c	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

- Tembusan : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
 2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Ikhsan Abdul Rahman
NPM : 185310402
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
Hari/Tanggal : Selasa 23 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yusrawati, SE., M.Si		
2	Dr. Iyoyo Dianto, SE., M.Si		


Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ikhsan Abdul Rahman
 NPM : 185310402
 Judul Proposal : Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
 Penguji : 1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.
 2. Haugesti Diana, SE., M.Ak.
 Hari/Tanggal Seminar : 08 Juni 2022
 Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :
 Judul : Disetujui
 Permasalahan : Jelas
 Tujuan Penelitian : Jelas
 Hipotesa : Sesuai
 Variabel yang diteliti : Jelas
 Alat yang dipakai : Sesuai
 Populasi dan sampel : Jelas
 Cara pengambilan sampel : Sesuai
 Sumber data : Jelas
 Cara memperoleh data : Jelas
 Teknik Pengolahan data : Jelas
 Daftar kepustakaan : Cukup
 Teknik penyusunan laporan : Jelas
 Kesimpulan tim seminar : Tidak perlu diseminarkan kembali

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Efi Susanti, SE., M.Acc.	Ketua	
2.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.	Anggota	
3.	Haugesti Diana, SE., M.Ak.	Anggota	



Mengetahui
Dekan Bidang Akademis

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.

Pekanbaru, 08 Juni 2022
Sekretaris

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 211/Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2022-03-07 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Efi Susanti, SE., M.Acc.	Asisten Ahli	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Ikhsan Abdul Rahman
N P M : 185310402
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 09 Maret 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP,Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eeo.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : IKHSAN ABDUL RAHMAN
NPM : 185310402
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA ANGGARAN
REALISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI
RIAU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi yaitu 30 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Agustus 2022
Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA ANGGARAN REALISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat atau pemikiran dari penulisan lain. Yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
Yang memberi pernyataan,



Ikhsan Abdul Rahman
Npm: 185310402

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melalui prinsip *value for money*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 97,12% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan nilai rasio sebesar 102,79% dikatakan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar 106,76% dikategorikan efektivitas. Pada tahun 2021 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 88,91% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan nilai rasio sebesar 110,67% dikategorikan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar 99,14% dikategorikan tidak efektivitas. Dengan demikian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 yang ditinjau dari elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) belum memenuhi prinsip *value for money*.

Kata kunci: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, *value for money*, kinerja

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance accountability of the Bengkalis District Social Service through the principle of value for money. The type of research used is qualitative. Data collection techniques used are documentation and interviews. The data obtained are in the form of Performance Reports of Government Agencies of the Bengkalis Regency Social Service in 2020 and 2021. The results of this study indicate that in 2020 the economic calculation with a ratio value of 97.12% is categorized as economic, the efficiency calculation with a ratio value of 102.79% is said to be efficient. , and the calculation of effectiveness with a ratio value of 106.76% is categorized as effectiveness. In 2021 economic calculations with a ratio value of 88.91% are categorized as economical, efficiency calculations with a ratio value of 110.67% are categorized as efficient, and effectiveness calculations with a ratio value of 99.14% are categorized as ineffective. Thus, the performance of the Bengkalis District Social Service in 2020 and 2021 in terms of economic, efficiency, and effectiveness (3E) elements has not met the value for money principle.

Keywords: *economical, efficiency, and effectiveness, value for money, performance*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subbhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau**” sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin dan ketetapan Allah Subbhanahuwata'ala, namun dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari orang – orang disekitar penulis yang begitu banyak memberi bantuan serta dukungannya. Maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada orangtua, M. Azis dan Tiwi Widyarti, Yantaufiq Hasriantoni dan Nuraini HM serta adek – adek yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan lainnya agar tetap berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Siska, SE., Msi., AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

5. Ibu Nina Nursida, SE., M.Acc., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
6. Ibu Efi Susanti, SE., M.Acc selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih banyak atas segala bimbingan, kritikan, masukan, motivasi, dan saran – saran yang penulis dapatkan dari selama proses penyusunan skripsi. Dengan segala kesibukan Ibu bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf jika ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis dapatkan berguna dikemudian hari dan selalu diberkahi oleh Allah Subbhanahuwata'ala.
8. Kepada Bapak Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan seluruh Staf terutama Ibu Zubaidah (Mak Ibed) terimakasih telah membantu dan memberikan izin kepada saya dalam memberikan data dan keterangan terkait penelitian ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugasnya.
9. Tiara Dwi Mustika selaku teman dekat saya, terimakasih selalu mensupport, memberikan semangat, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, yang memberikan solusi, motivasi, terimakasih banyak telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Seluruh teman – teman saya yang bersedia saling berbagi ilmu pengetahuan, kebersamaan, semangat dan dorongan kepada penulis yaitu Rizky, Sultan,

Aan, Ayeq, Arip, Genta, Anggi, Mella, Asa dan anggota kelas D Akuntansi angkatan 2018 lainnya.

11. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, doa, dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Akhir kata penulis berharap Allah Subhanahuwata'ala memberikan balasan yang berlipat ganda atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Penulis,

Ikhsan Abdul Rahman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
2.1 Telaah Pustaka	13
2.1.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	13
2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi	13
2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi	15
2.1.4 Aspek – Aspek Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi..	16
2.1.5 Keuntungan Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi.....	17
2.1.6 Pengertian Indikator Kinerja.....	18
2.1.7 Peran Indikator Kinerja.....	19
2.1.8 Pengertian Organisasi Sektor Publik	20
2.1.9 Pengertian <i>Value For Money</i>	20
2.1.10 Tujuan <i>Value For Money</i>	25
2.1.11 Implementasi Konsep <i>Value For Money</i>	26
2.1.12 Kerangka Pemikiran.....	27
2.2 Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Objek Penelitian.....	28
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	29
3.3.1 <i>Value For Money</i>	29
3.3.2 Kinerja Anggaran Realisasi	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32

3.5	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6	Teknik Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.2	Hasil Perhitungan <i>Value For Money</i>	37
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	90
5.1	Simpulan.....	90
5.2	Saran.....	91
	DAFTAR PUSTAKA.....	92
	LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	5
Tabel 1.2 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	6
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	37
Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	41
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	44
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	51
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	57
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	65
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	71
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Struktur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik yaitu salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan baik itu dalam bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, kepastian hukum dan lain sebagainya. Pemerintah ditingkat daerah memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dalam kualitas jasa yang menjadi pusat layanan bagi masyarakat. Perubahan ruang lingkup daerah yang terus berlangsung sangat cepat mengharuskan setiap organisasi untuk dapat dengan cepat dan tepat beradaptasi dengan perubahan secara cerdas menerapkan berbagai metode pengolahan organisasi sesuai dengan pengolahan sumber – sumber ekonomis erat kaitannya dengan pengolahan keuangan, yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan (Rahman, 2021).

Kinerja instansi pemerintah saat ini juga menjadi pusat perhatian dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggara administrasi publik. Masyarakat terkadang menilai organisasi sektor publik sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat kini semakin cerdas dan kritis untuk menuntut melakukan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga – lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang tersebut telah dibelanjakan, melainkan kemampuan

dalam menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi dan efektif (Basri, 2018).

Masing – masing elemen, mempunyai perbedaan penilaian. Elemen ekonomis dihitung dengan membandingkan nilai realisasi anggaran dengan anggarannya, elemen efisiensi dihitung dengan membandingkan persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan dengan persentase nilai ekonominya, elemen efektifitas dihitung dengan membandingkan persentase dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dengan persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan (Dwinanda, 2018).

Pengukuran kinerja anggaran realisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, Pengukuran kinerja organisasi sektor publik kinerja pemerintahan. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk bisa membantu pemerintah berfokus pada tujuan serta target program unit kerja. Hal ini akhirnya akan mempertinggi efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya serta pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Husna, 2018).

Value for money merupakan konsep pengukuran kinerja yang berdasarkan pada elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Halim & Kusufi, 2018). Organisasi sektor publik harus memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya, tuntutan ini sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengolahan keuangan negara

dan daerah harus dikelola secara ekonomis, efisiensi dan efektif seta harus bertanggung jawab dengan asas keadilan. Dengan adanya *value for money* diharapkan organisasi atau instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja serta dapat meminimalisir pemborosan dan sumber kebocoran dana, karena *value for money* dapat memberikan informasi apakah anggaran yang digunakan atau yang telah dibelanjakan menghasilkan nilai (*value*) bagi masyarakatnya (Hatta, 2021).

Ekonomi merupakan praktik atau kegiatan pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi juga sering disebut kehematan yang mencakup pengolahan secara hati – hati atau sebaik mungkin dan tidak ada pemborosan. Kegiatan operasional bisa dikatakan ekonomis apabila mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak penting atau kurang bermanfaat (Putra, 2022).

Efisiensi mempunyai hubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan guna untuk perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan operasional bisa dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil yang dikerjakan telah tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (Putra, 2022).

Efektivitas mempunyai hubungan dalam mencapai tujuan atau target kebijakan (hasil guna), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang telah tercapai. Kegiatan operasional bisa dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Putra, 2022).

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan dalam bidang sosial dibawah Bupati, fokus dari masalahnya didominasi oleh bantuan terhadap masyarakat sesuai aturan pemerintah pusat. Proses dalam penyaluran ini memerlukan penganggaran dana yang akuntabel dan transparan karena kinerjanya menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Dalam memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi, yang diperlukan adalah analisis menyeluruh atas kinerja yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran (Fitriah, 2021).

Masalah sosial di Indonesia pada saat ini menjadi sorotan di kalangan publik. Kesejahteraan sosial yang terdapat diberbagai daerah merupakan permasalahan konkrit yang perlu diatasi. Dengan menerapkan konsep *value for money* kita dapat menghitung nilai masing – masing elemen dengan cara membandingkan nilai – nilai yang berhubungan dengan kinerja. Hasil dari perhitungan masing – masing elemen akan dibandingkan dengan tolak ukur yang telah diterapkan untuk dapat mengetahui seberapa efektif, efisien dan ekonomis kinerja yang telah dilakukan oleh instansi. Hasil perhitungan konsep *value for money* akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kinerja instansi pemerintah.

Salah satu instansi pemerintah adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Setiap tahunnya Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis membuat program dan kegiatan.

Berikut anggaran dan realisasi untuk masing – masing program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1.1

Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 (dalam Rupiah)

No	Program	2020		(%)
		Anggaran	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.222.119.488	3.201.998.643	99,38
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	726.680.000	717.326.005	98,71
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32.231.789	29.437.789	91,33
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.800.000	59.770.000	99,95
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	20.177.262.500	19.769.967.574	97,98
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.967.545.500	2.827.808.798	95,29
7	Program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	144.252.480	143.967.480	99,80
8	Program Pembinaan EKS Penyandang Penyakit Sosial (EKS, Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)	57.347.000	39.966.800	69,69
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3.382.390.600	3.091.800.600	91,41
Jumlah Belanja		30.769.629.357	29.882.043.689	97,11

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Tabel 1.2

**Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 (dalam Rupiah)**

No	Program	2021		(%)
		Anggaran	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.197.838.200	4.943.392.107	95,10
2	Program Pemberdayaan Sosial	3.655.174.800	3.507.429.112	95,95
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.669.933.400	976.053.054	58,44
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	45.132.270.500	39.920.657.097	88,45
5	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	526.648.000	505.952.178	96,07
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.041.709.600	1.021.172.000	98,02
Jumlah Belanja		53.568.399.700	50.874.655.548	88,90

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Menurut laporan alokasi dan realisasi anggaran instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis periode 2020 dan 2021, realisasi pengeluaran keuangan untuk masing – masing yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis selama ini lebih kecil dari pada target yang dianggarkan. Pada tahun 2020 terdapat 9 program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial, Program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan EKS Penyandang Penyakit Sosial (EKS, Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2021 terdapat 6 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Berdasarkan laporan alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020 program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 99,95%. Sedangkan program dengan capaian realisasi terendah yaitu Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EKS, Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) sebesar 69,69%.

Berdasarkan laporan alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2021 program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi adalah Program Pengolahan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar 98,02%. Sedangkan program dengan capaian realisasi terendah yaitu Program Rehabilitasi Sosial sebesar 58,44%.

Selain itu masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam program tahun 2020 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 97,98% dengan kegiatan pengendalian penanganan kesejahteraan sosial

terhadap fakir miskin dan warga KAT (Komunitas Adat Terpencil). Tahun 2021 Program Pemberdayaan Sosial sebesar 95,95% dengan kegiatan pengendalian penanganan kesejahteraan sosial dan peran aktif PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).

Dilihat dari pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pencapaiannya diatas 90% yang artinya kegiatan yang dilakukan telah terlaksana dengan baik. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bagian Pelayanan Masyarakat/tempat pengaduan masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis diketahui masih banyak masyarakat atau PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) mengeluhkan terkait penyaluran bantuan – bantuan sosial yang dinilai tidak adil dimana sebagian masyarakat belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan). Hal ini juga didukung dari berita hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Dinas Sosial tahun anggaran 2020 yang mana seharusnya dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19 (www.antarane.ws.com, 2020).

Dilihat dari beberapa masalah yang telah dikemukakan diatas perlu sekiranya pengukuran kinerja anggaran realisasi untuk melihat apakah pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan konsep *value for money* yaitu ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul **Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan konsep *value for money* yang dilihat dari segi ekonomis?
2. Bagaimana kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan konsep *value for money* yang dilihat dari segi efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan konsep *value for money* yang dilihat dari segi efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan konsep *value for money* yang dilihat dari segi ekonomis.
2. Untuk mengukur kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan konsep *value for money* yang dilihat dari segi efisiensi.

3. Untuk mengukur kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan konsep *value for money* yang dilihat dari segi efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai sarana yang tepat dalam menerapkan teori akuntansi dan yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta dapat berbagi ilmu pengetahuan yang terkhusus dengan masalah konsep *value for money*.

2. Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tentang penilaian.

3. Peneliti lainnya

Penulis berharap ini dapat menjadi acuan atau inspirasi untuk peneliti lain yang ingin meneliti kasus serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang pengertian atau definisi yang diambil dari kutipan buku yang terkait dengan penyusunan proposal. Selanjutnya, berdasarkan telaah pustaka tersebut, akan dihasilkan proposisi (pernyataan - pernyataan yang dapat diuji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang analisis dari hasil observasi penelitian untuk menjawab bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sampai 2021 agar pengolahan data dapat diolah secara efektif dan efisien dalam mengambil keputusan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas kesimpulan yang berisikan jawaban permasalahan bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, sedangkan saran berisikan implikasi, dan tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah kondisi atau gambaran yang berhubungan dengan tingkat tercapainya suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sektor publik yang tertuang dalam perumusan skema – skema *strategic planning*, secara umum kinerja adalah suatu gambaran keberhasilan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuannya dalam periode tertentu (Mahsun, 2013).

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu teknik evaluasi dalam kemajuan pekerjaan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Dwinanda, 2018). Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi

Tujuan pengukuran kinerja anggaran realisasi bagi organisasi sektor publik menurut Mahmudi (2015) adalah:

1. Mengetahui tingkat pencapaian organisasi, menjelaskan apakah organisasi telah berjalan sesuai dengan arah yang ditentukan atau menyimpang dari tujuan yang ditentukan. Apabila terjadi penyimpangan, pimpinan dengan cepat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan. Pengukuran kinerja bermanfaat sebagai memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur, dan melaporkan kinerja.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai, bertujuan untuk memperbaiki hasil usaha yang dilakukan pegawai dan berhubungan dengan tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana pegawai melakukan tugas dan kewajibannya, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya, bertujuan supaya membentuk budaya berprestasi pada organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat ditumbuhkan jika sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga pegawai dalam organisasi dituntut untuk berpartisipasi. Menciptakan atmosfer diperlukan perbaikan kinerja yang dilakukan secara terus menerus.
4. Memberikan pertimbangan sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), contohnya seperti kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, contoh *punishment* adalah memutuskan kerja, penundaan promosi, dan teguran. Sistem manajemen kinerja modern adalah

sistem gaji yang mendukung berdasarkan kinerja. Untuk mengimplementasikan sistem penggajian berbasis kinerja/hasil, maka organisasi sektor publik harus memiliki sistem yang modern, efektif dan valid.

5. Memotivasi pegawai, contohnya seperti pemberian penghargaan (*reward*) bagi pegawai yang berkinerja tinggi dan harapan memperoleh kompensasi yang tinggi juga.
6. Menciptakan akuntabilitas publik menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial tercapai. Kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan kinerja berguna bagi pihak internal untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Sedangkan bagi eksternal untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik.

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi

Pengukuran kinerja Anggaran Realisasi sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja anggaran realisasi yang handal juga merupakan salah satu kunci kesuksesan organisasi. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja dapat memotivasi manajer dan karyawan untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan (Indriyawati, 2020).

Manfaat dari penilaian kinerja anggaran realisasi menurut Efriyanti (2012) ada 5 yaitu:

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.

2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.

2.1.4 Aspek – Aspek Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi

Ada 6 (enam) aspek dalam pengukuran kinerja anggaran realisasi menurut Rempowatu & Tirayoh, (2016) yaitu:

1. Kelompok masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*) merupakan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak terwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

5. Kelompok manfaat (*benefit*) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan negatif.
6. Kelompok dampak (*impact*) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

2.1.5 Keuntungan Pengukuran Anggaran Realisasi

Ada 7 (tujuh) Keuntungan dalam Pengukuran Anggaran Realisasi menurut Arinda (2021) yaitu:

1. Pengukuran memberikan mekanisme pelaporan program kinerja pada manajemen yang lebih tinggi. Pengukuran memfokuskan pada perhatian tentang apa yang harus diselesaikan dan mengarahkan organisasi untuk berkonsentrasi pada waktu, sumber daya dan energi dalam mencapai sasaran jika hasilnya berbeda dengan sasaran organisasi dapat melakukan analisis kesenjangan kinerja dan membuat penyesuaiannya.
2. Pengukuran akan meningkatkan komunikasi internal antara staf dan pegawai, sebagaimana secara eksternal antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Penekanan dalam pengukuran dan peningkatan kinerja akan menciptakan iklim baru yang mempengaruhi semua pihak dalam memandang organisasi.
3. Organisasi sektor publik yang berorientasi pada hasil membutuhkan informasi yang akurat dalam program dan layanan sektor publik yang berkualitas. Pengumpulan dan pengolahan informasi yang akurat tergantung pada keefektifan komunikasi aktivitas – aktivitas kritis pada pencapaian misi.

4. Pengukuran kinerja menunjukkan atau mendemonstrasikan akuntabilitas sektor publik kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan lain.
5. Pengukuran kinerja dapat menurunkan emosi dan mendorong pemecahan masalah secara konstruktif. Pengukuran memberikan data konkrit yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan baik, tidak hanya berdasar intuisi saja.
6. Pengukuran kinerja meningkatkan pengaruh suatu hal dengan pengukuran dapat diidentifikasi wilayah – wilayah membutuhkan perhatian dan memungkinkan pengaruh positif pada wilayah tersebut.
7. Perbaikan tidak akan mungkin dilakukan tanpa pengukuran kinerja. Jika organisasi tidak mengetahui posisi saat ini, maka tidak mungkin dapat ditentukan akan berada dimana, dan akan menjadi seperti apa, organisasi butuh peta untuk dapat menentukan orientasi ke depan.

Dari point – point diatas dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari pengukuran kinerja adalah memberikan pendekatan terstruktur dan fokus pada perencanaan strategis, tujuan dan kinerja yang akan dicapai oleh instansi atau organisasi sektor publik.

2.1.6 Pengertian Indikator Kinerja

Mahsun (2013) rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah jelas oleh *stakeholders*. Indikator kerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan

dihitungkan dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sangat sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijakan – kebijakan maupun program suatu instansi pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau tidak berhasil di masa mendatang.

Yanti (2021) indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah diterapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*).

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa, indikator kinerja merupakan hal – hal atau kriteria baik itu dalam kualitatif ataupun kuantitatif untuk mengukur kinerja dalam sebuah melakukan strategi yang sudah ditentukan.

2.1.7 Peran Indikator Kinerja

Mardiasmo (2018) bahwa peran indikator yang digunakan dalam pemerintah yaitu membantu organisasi untuk mengevaluasi aktivitas dan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran indikator kinerja bagi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial

4. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
5. Untuk menunjukkan standar kinerja
6. Untuk menunjukkan efektivitas
7. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran
8. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

2.1.8 Pengertian Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Organisasi sektor publik bisa tidak lepas dari pemerintahan maka organisasi sektor publik identik dengan pemerintah (Basri, 2018).

Maka dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik merupakan organisasi pelayanan publik yang mana dapat melayani kepentingan umum dengan cakupan masyarakat luas. Organisasi sektor publik pastinya selalu berkaitan dengan pemerintah.

2.1.9 Pengertian *Value For Money*

Value For Money adalah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik dimana kinerja organisasi sektor publik tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama – sama (Arifani, 2018).

Value For Money Menurut Mahmudi (2015) adalah konsep paling penting dalam organisasi sektor publik. Untuk meningkatkan kinerja secara sektor publik diperlukan manajemen kinerja yang berorientasi pada *value for money*.

Pengertian *value for money* menurut Mardiasmo (2018) adalah konsep pengolahan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa *value for money* adalah salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik dengan memperhatikan *input*, *output*, dan *outcome* sebagai dasar perhitungan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi kinerja.

1. Ekonomi

Mardiasmo (2018) Ekonomi merupakan hubungan antara pasar dan *input* dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Khalikussabir (2016) ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sederhananya ekonomis berhubungan dengan biaya operasi (*cost of operation*). Untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa

persentase tingkat pencapaian. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat ekonomis adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Input: Realisasi anggaran

Merupakan angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan.

Nilai Input: Anggaran

Merupakan angka target anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja.

Kriteria ekonomis menurut Mardiasmo (2018):

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis atau sangat ekonomis.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis.

2. Efisiensi

Mardiasmo (2018) Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu. Proses

kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya.

Isna (2015) efisiensi merupakan hubungan antara *input* dan *output*. Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya berarti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefit and minimizing costs*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang hampir serupa antara efisien dengan ekonomi karena kedua – duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu (*input*) atau penggunaan masukan terendah.

Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Output: Persentase capaian fisik dari program

Angka output yang dimaksud adalah persentase capaian fisik dari program – program yang dilaksanakan.

Input: Persentase keuangan program

Angka input yang dimaksud adalah persentase keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program – program

Menurut Mardiasmo (2018) kriteria efisiensi adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien.

- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisien berimbang atau cukup efisien.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efisien atau sangat efisien.

3. Efektivitas

Mardiasmo (2018) Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas yaitu pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Isna (2015) efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan yang telah diterapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomis membahas mengenai input, efektivitas membahas tentang output dan efisiensi membahas tentang input dan output. Artinya ketiga elemen tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Outcome: Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

Output: Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari program – program yang dilaksanakan

Mardiasmo (2018) dalam kriteria efektivitas adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang atau cukup efektif.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif atau sangat efektif.

2.1.10 Tujuan *Value For Money*

Khalikussabir (2016) tujuan pelaksanaan *value for money* adalah yang pertama ekonomi yaitu hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, kedua efisiensi yaitu berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, ketiga efektivitas yaitu berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan terkait pelaksanaan *value for money* (Khalikussabir, 2016) adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.1.11 Implementasi Konsep *Value For Money*

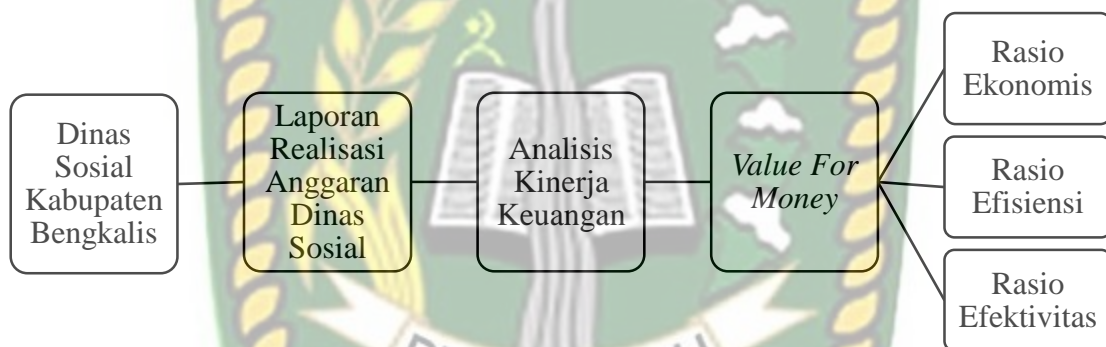
Putri (2020) *value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Implementasi konsep *value for money* ini dapat memperbaiki akuntansi sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Menurut Mardiasmo (2018) manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

3. Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.1.12 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.2 Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu: Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis belum memenuhi prinsip *value for money*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) “kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum memiliki masalah, atau keinginan yang jelas tetapi dapat langsung memasuki objek yang masih bersifat umum dan hasil akhir dari kualitatif akan menghasilkan informasi – informasi yang bermakna dan bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif sehingga hipotesis atau ilmu yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengatasi masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data kemudian dianalisis berdasarkan teori – teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan karena bermaksud untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kerjanya dengan baik atau tidak berdasarkan anggaran realisasi yang dilihat dari perhitungan pengukuran *value for money* yaitu dengan menggunakan elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Jalan Antara, Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau 28711.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

3.3.1 Value For Money

Value for money merupakan metode yang fungsinya untuk menilai atau mengukur sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan sudah mengelola kinerja keuangan dengan baik sesuai dengan tiga elemen dalam *value for money* yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas.

Berikut cara mengukur kinerja keuangan dengan metode *value for money* adalah:

1. Ekonomis

Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat ekonomis adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input: Realisasi Anggaran

Anggaran input yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Nilai input: Anggaran

Angka nilai input yang dimaksud adalah angka target anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Mardiasmo (2018), dalam kriteria ekonomis adalah

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis atau sangat ekonomis.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis.

2. Efisiensi

Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output: Persentase capaian fisik dari program
 Angka output yang dimaksud adalah persentase capaian fisik dari program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Input: Persentase keuangan program
 Angka input yang dimaksud adalah persentase keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program – program dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Mardiasmo (2018) kriteria efisiensi adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisien berimbang atau cukup efisien.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efisien atau sangat efisien.

3. Efektivitas

Efektivitas (berhasil tercapai) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome: Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

Output: Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Mardiasmo (2018) dalam kriteria efektivitas adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang atau cukup efektif.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif atau sangat efektif.

3.3.2 Kinerja Anggaran Realisasi

Kinerja anggaran realisasi merupakan gambaran tolak ukur yang menjelaskan keadaan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan tujuan, standar dan syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer didalam penelitian ini ialah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan didalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2020 dan 2021.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada informasi yang dikumpulkan dari sumber – sumber yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini ialah berupa jurnal, literatur, skripsi, serta buku terdahulu yang berkaitan dengan penelitian analisis *Value For Money* pada pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang pada penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari segala informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, buku – buku, atau sumber data tertulis lainnya baik berupa teori, laporan penelitian, ataupun penemuan sebelumnya. Laporan yang diolah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020 dan 2021.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Sub Penyusunan Program dan Kepala Bagian Sub Keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Penelitian akan melakukan pengukuran kinerja anggaran realisasi melalui pengukuran *value for money* dengan melihat 3 elemen, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Dari pengukuran elemen ini, kemudian peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah kinerja anggaran realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sudah baik atau belum. Data – data untuk menghitung ketiga elemen ini didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020 dan 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupatn Bengkalis. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial.

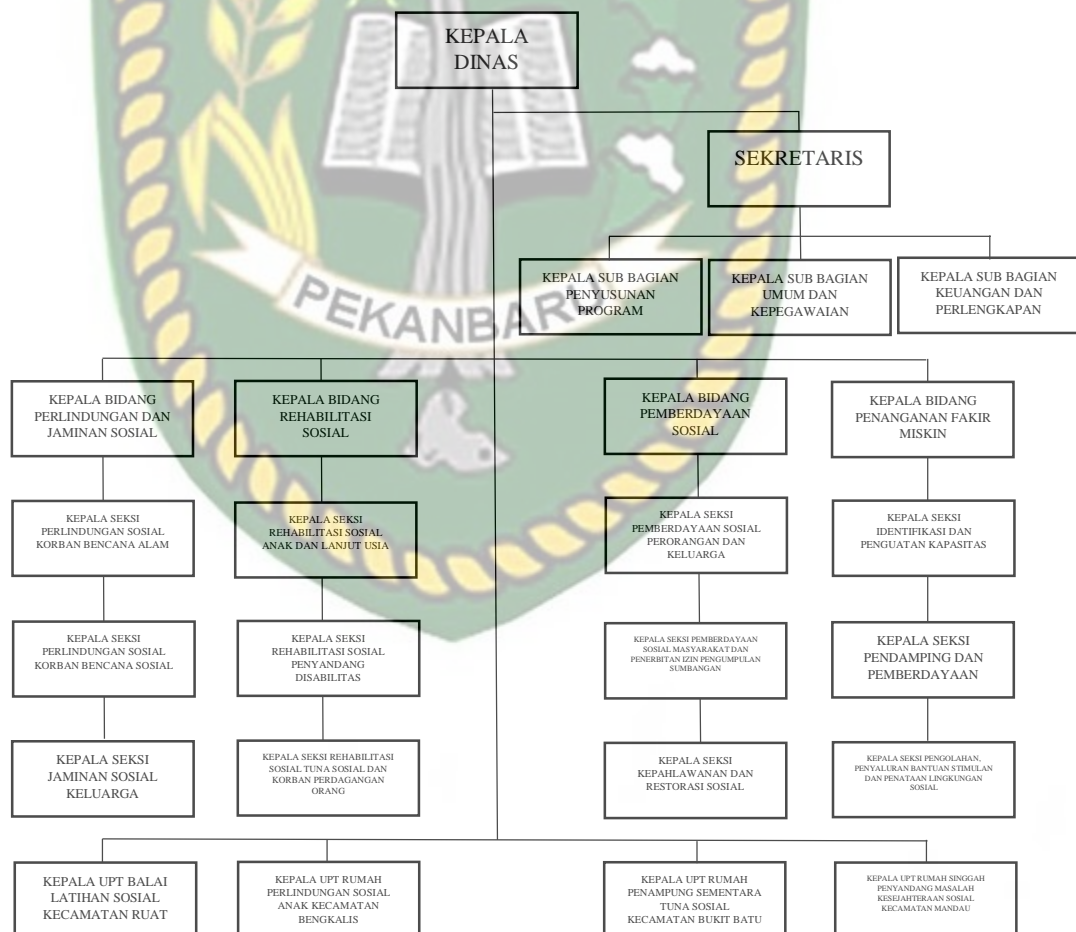
Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial
2. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial
3. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memiliki visi yaitu Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia. Dan misi adalah Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

Gambar 4.1
Struktur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis



1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat, terdiri dari:**
 1. Subbag Penyusunan Program
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian dan
 3. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:**
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 2. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. **Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:**
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. **Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:**
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial, masyarakat dan Penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan dan
 3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
6. **Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:**
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dan

3. Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.

4.2 Hasil Perhitungan *Value For Money* Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dan 2021

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memiliki program – program setiap tahunnya. Pada setiap program, terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Setiap program membutuhkan anggaran agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Setiap pertanggungjawaban kegiatan ditulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Di dalam LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdapat 9 program yang dijalankan pada tahun 2020. Berikut merupakan nama program dengan kegiatannya masing – masing.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman

No	Nama Program	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - Penyediaan Jasa Sopir Kantor - Publikasi Informasi Pembangunan - Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Mebelur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan Manajemen Pembangunan Sosial
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH) Kecamatan Bengkalis dan Bantan - Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupert dan Rupert Utara - Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH) Kecamatan Rupert dan Rupert Utara - Penyediaan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin - Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis - Penyediaan Kube Pertumbuhan - Penyaluran Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT)

No	Nama Program	Kegiatan
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perumusan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT) - Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal - Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana - Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal - Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial - Pemeliharaan Usia Lanjut Bedridden - Pelatihan Mengemudi Bagi Eks Anak Bermasalah - Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Pinggir - Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bengkalis - Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bantan - Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bukit Batu - Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Mandau - Seleksi dan Evaluasi Calon Orang Tua Angkat Dalam Proses Adopsi Anak - Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial - Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Singgah PMKS - Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) - Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Batin Solapan - Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial
7	Program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman Klien Penyandang Cacat Yang Akan Mengikuti Pelatihan Keterampilan Di Panti Sosial Di Luar Provinsi - Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Kusta dan Penyakit Kronis

No	Nama Program	Kegiatan
		- Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	- Pencegahan Korban Trafficking - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Anak Punk dan Anak Jalanan
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	- Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH Oleh Daerah - Pengembangan Model LK3 Tentang Konseling Keluarga - Penguatan Kelembagaan K38 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP - Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Kesejahteraan Sosial

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki 14 kegiatan, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki 6 kegiatan, program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 2 kegiatan, program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki 1 kegiatan, program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial memiliki 8 kegiatan, program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial memiliki 18 kegiatan, program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma memiliki 3 kegiatan, program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial

Lainnya) memiliki 2 kegiatan, dan program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki 7 kegiatan.

Pada tahun 2021, terdapat 6 program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Berikut merupakan nama program beserta kegiatannya.

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

No	Nama Program	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
2	Program Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K)
3	Program Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Pemakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Alat Bantu - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial - Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Layanan Rujukan - Penyediaan Pemakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Alat Bantu - Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemberian Layanan Rujukan
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Penjangkauan Anak – Anak Terlantar - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat

No	Nama Program	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Makanan - Penyediaan Sandang - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
5	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Sosial Tahun 2021

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 20 kegiatan, program Pemberdayaan Sosial memiliki 6 kegiatan, program Rehabilitasi Sosial memiliki 13 kegiatan, program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki 9 kegiatan, program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan memiliki 2 kegiatan, dan program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) memiliki 1 kegiatan.

Terdapat 3 elemen utama dalam perhitungan *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas

1. Ekonomis

Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat ekonomis adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Dimana input merupakan realisasi anggaran dan nilai input merupakan anggaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Berikut merupakan perhitungan elemen ekonomis pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.650.000	4.650.000	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.500.000	229.771.668	94,36
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	28.000.000	25.606.340	91,45
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.352.029.000	1.348.663.570	99,75
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.982.988	82.982.000	100,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.687.500	48.687.300	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	11.980.000	99,83
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	17.700.000	17.700.000	100,00
		Penyediaan Makanan dan Minuman	50.050.000	49.682.500	99,27
		Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000	299.770.265	99,92
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	249.600.000	249.600.000	100,00

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Penyediaan Jasa Sopir Kantor	172.800.000	172.800.000	100,00
		Publikasi Informasi Pembangunan	223.720.000	223.705.000	99,99
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	436.400.000	436.400.000	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	49.700.000	49.552.000	99,70
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	152.300.000	145.800.000	95,73
		Pengadaan Mebelur	105.000.000	104.022.500	99,07
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	272.605.000	271.802.300	99,71
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	127.000.000	126.999.205	100,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.075.000	19.150.000	95,39
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	12.231.789	12.231.789	100,00
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan Manajemen Pembangunan Sosial	20.000.000	17.206.000	86,03
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	59.800.000	59.770.000	99,95

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
	Capaian Kinerja dan Keuangan				
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH) Kecamatan Bengkalis dan Bantan	549.400.000	548.493.184	99,83
		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	200.000.000	189.988.800	94,99
		Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara	360.000.000	359.400.000	99,83
		Penyediaan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin	340.850.000	330.950.000	97,10
		Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis	691.363.500	441.946.500	63,92
		Penyediaan Kube Pertumbuhan	730.000.000	722.518.100	98,98

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Penyaluran Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT)	17.083.371.000	16.957.080.546	99,26
		Koordinasi Perumusan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT)	222.278.000	219.590.444	98,79
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	11.490.000	11.490.000	100,00
		Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	324.000.000	258.328.000	79,73
		Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal	162.380.000	145.457.700	89,58
		Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	267.000.000	266.880.000	99,96
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban	629.800.000	605.869.840	96,20

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Bencana Alam dan Sosial			
		Pemeliharaan Usia Lanjut Bedridden	278.920.000	278.910.000	100,00
		Pelatihan Mengemudi Bagi Eks Anak Bermasalah	150.000.000	149.185.000	99,46
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Pinggir	225.900.000	222.935.180	98,69
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bengkalis	94.650.000	93.526.660	98,81
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bantan	74.700.000	72.713.160	97,34
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bukit Batu	66.850.000	65.594.260	98,12
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di	233.800.000	229.443.998	98,14

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Kecamatan Mandau			
		Seleksi dan Evaluasi Calon Orang Tua Angkat Dalam Proses Adopsi Anak	17.500.000	17.185.000	98,20
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial	29.548.500	26.475.000	89,60
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Singgah PMKS	33.167.000	32.779.500	98,83
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)	37.785.000	26.822.500	70,99
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Batin Solapan	312.300.000	306.590.500	98,17
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	17.755.000	17.622.500	99,25
7	Program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pengiriman Klien Penyandang Cacat Yang Akan Mengikuti Pelatihan Keterampilan Di	31.252.480	31.252.480	100,00

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Panti Sosial Di Luar Provinsi			
		Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Kusta dan Penyakit Kronis	45.000.000	44.775.000	99,50
		Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda	68.000.000	67.940.000	99,91
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pencegahan Korban Trafficking	52.147.000	34.766.800	66,67
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Anak Punk dan Anak Jalanan	5.200.000	5.200.000	100,00
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH Oleh Daerah	1.074.259.600	1.061.330.600	98,80
		Pengembangan Model LK3 Tentang Konseling Keluarga	96.515.000	95.031.000	98,46
		Penguatan Kelembagaan K38	232.600.000	218.340.000	93,87
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.193.860.000	1.006.859.000	84,34
		Pemeliharaan Sarana dan	139.270.000	138.920.000	99,75

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Prasarana Pemakaman			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	16.166.000	16.166.000	100,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Kesejahteraan Sosial	629.720.000	555.154.000	88,16
Ekonomis			30.769.629.357	29.882.043.689	97,12

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.3, hasil perhitungan ekonomis kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melaksanakan 61 kegiatan yang telah dijalankan, dengan perhitungan terkecil 63,92% dan perhitungan terbesar 100%. Terdapat 47 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan terdapat 14 kegiatan dengan nilai ekonomis 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan ekonomis pada tahun 2021. Berikut perhitungan ekonomis kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2021.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.365.000	57.216.000	64,75
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.190.000	13.955.000	60,18

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
	Kabupaten/ Kota	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	336.000.000	336.000.000	100,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	69.932.000	56.832.338	81,27
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	25.137.000	18.899.000	75,18
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.142.100	143.205.800	86,19
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.600.000	86.549.500	83,54
		Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	55.683.300	55.659.500	99,96
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	30.000.000	29.350.000	97,83
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.226.000	350.722.149	97,91
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	289.000.000	287.000.000	99,31
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	400.000.000	348.400.000	87,10

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Pengadaan Mebel	200.570.000	199.481.500	99,46
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	523.394.000	516.491.400	98,68
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	166.100.000	165.700.000	99,76
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	205.618.800	187.497.660	91,19
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.520.000	172.800.000	96,80
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	313.660.000	289.752.393	92,38
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	350.400.000	348.800.000	99,54
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.314.300.000	1.279.079.867	97,32
2	Program Pemberdayaan Sosial	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	1.927.251.200	1.903.066.000	98,75
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja	625.037.700	546.166.065	87,38

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	192.580.000	189.660.000	98,48
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	61.490.000	36.675.000	59,64
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	740.725.900	733.387.272	99,01
		Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K)	108.090.000	98.474.775	91,10
3	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	15.340.000	0	0
		Penyediaan Sandang	15.390.000	10.290.000	66,86
		Penyediaan Alat Bantu	460.524.000	325.922.817	71,00

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	80.880.000	36.610.000	45,26
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	367.115.000	285.535.000	77,78
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	204.649.000	55.780.837	27,26
		Pemberian Layanan Rujukan	271.310.000	123.830.000	45,64
		Penyediaan Pemakaman	10.890.000	3.420.000	31,40
		Penyediaan Sandang	17.000.000	1.300.000	7,65
		Penyediaan Alat Bantu	129.680.000	105.549.000	81,39
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.000.000	8.000.000	20,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25.550.400	9.237.400	36,15
		Pemberian Layanan Rujukan	31.605.000	10.578.000	33,47
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penjangkauan Anak – Anak Terlantar	1.295.851.500	1.195.951.750	92,29
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	586.667.800	420.446.150	71,67
		Pengelolaan Data Fakir Miskin	167.115.300	150.450.300	90,03

No	Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis %
		Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	21.333.614.500	21.094.166.604	98,88
		Fasilitasi Bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.406.042.800	2.386.327.491	99,18
		Penyediaan Makanan	5.827.409.200	2.090.564.200	35,87
		Penyediaan Sandang	372.859.400	145.213.200	38,95
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	12.955.550.000	12.291.917.402	94,88
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	187.160.000	145.620.000	77,81
5	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	288.300.000	287.532.978	99,73
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	238.348.000	218.419.200	91,64
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.041.709.600	1.021.172.000	98,03
Ekonomis			57.223.574.500	50.874.655.548	88,91

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.4, hasil perhitungan ekonomis kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melaksanakan 51 kegiatan yang telah dijalankan, dengan perhitungan ekonomis terkecil sebesar 0% dan perhitungan terbesar sebesar 100%. Terdapat 50 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan terdapat 1 kegiatan dengan nilai ekonomis 100%.

2. Efisiensi

Elemen *value for money* kedua adalah efisiensi, Mardiasmo (2018) cara mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Dimana *output* merupakan persentase capaian fisik kegiatan dan *input* merupakan persentase capaian keuangan yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Berikut merupakan perhitungan elemen efisiensi pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,36	94,36	100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	91,45	91,45	100,00

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,00	99,75	100,25
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	100,00	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	100,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	99,83	100,17
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	100,00	100,00	100,00
		Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00	99,27	100,74
		Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,00	99,92	100,08
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100,00	100,00	100,00
		Penyediaan Jasa Sopir Kantor	100,00	100,00	100,00
		Publikasi Informasi Pembangunan	100,00	99,99	100,01
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	100,00	100,00	100,00

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100,00	99,70	100,30
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	96,00	95,73	100,28
		Pengadaan Mebelur	100,00	99,07	100,94
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,00	99,71	100,29
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100,00	100,00	100,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	95,39	95,39	100,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,00	100,00	100,00
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan Manajemen Pembangunan Sosial	86,03	86,03	100,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	100,00	99,95	100,05
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni	100,00	99,83	100,17

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
	Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Warga KAT (PAH) Kecamatan Bengkalis dan Bantan			
		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupa dan Rupa Utara	95,00	94,99	100,01
		Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH) Kecamatan Rupa dan Rupa Utara	100,00	99,83	100,17
		Penyediaan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin	97,10	97,10	100,00
		Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis	64,00	63,92	100,13
		Penyediaan Kube Pertumbuhan	100,00	98,98	101,03
		Penyaluran Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT)	100,00	99,26	100,75
		Koordinasi Perumusan Kebijakan Dalam	99,00	98,79	100,21

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Pelaksanaan Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT)			
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	100,00	100,00	100,00
		Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	80,00	79,73	100,34
		Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal	90,00	89,58	100,47
		Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	100,00	99,96	100,04
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	96,20	96,20	100,00
		Pemeliharaan Usia Lanjut Bedridden	100,00	100,00	100,00
		Pelatihan Mengemudi Bagi	100,00	99,46	100,54

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Eks Anak Bermasalah			
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Pinggir	100,00	98,69	101,33
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bengkalis	100,00	98,81	101,20
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bantan	97,34	97,34	100,00
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bukit Batu	98,12	98,12	100,00
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Mandau	98,14	98,14	100,00
		Seleksi dan Evaluasi Calon Orang Tua Angkat	98,20	98,20	100,00

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Dalam Proses Adopsi Anak			
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial	90,00	89,60	100,45
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Singgah PMKS	99,00	98,83	100,17
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)	71,00	70,99	100,01
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Batin Solapan	98,17	98,17	100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	100,00	99,25	100,76
7	Program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pengiriman Klien Penyandang Cacat Yang Akan Mengikuti Pelatihan Keterampilan Di Panti Sosial Di Luar Provinsi	100,00	100,00	100,00
		Pendayagunaan Para Penyandang	100,00	99,50	100,50

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Cacat dan Eks Trauma Kusta dan Penyakit Kronis			
		Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda	100,00	99,91	100,09
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pencegahan Korban Trafficking	67,00	66,67	100,49
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Anak Punk dan Anak Jalanan	100,00	100,00	100,00
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH Oleh Daerah	99,00	98,80	100,20
		Pengembangan Model LK3 Tentang Konseling Keluarga	98,46	98,46	100,00
		Penguatan Kelembagaan K38	94,00	93,87	100,14
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	84,34	84,34	100,00
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	100,00	99,75	100,25

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Kesejahteraan Sosial	100,00	88,16	113,43
Efisiensi			99,83	97,12	102,79

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 terdapat 57 kegiatan dengan nilai persentase efisiensi 100%, dan 4 kegiatan dengan nilai persentase efisiensi lebih dari 100%. Terdapat juga persentase efisiensi terbesar yaitu 113,43% pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Peneliti juga melakukan perhitungan efisiensi pada tahun 2021. Berikut perhitungan efisiensi kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2021.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,00	64,75	100,39
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,00	60,18	99,70

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
	Kabupaten/ Kota	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	81,00	81,27	99,67
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	75,00	75,18	99,76
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,00	86,19	99,78
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84,00	83,54	100,55
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	100,00	99,96	100,04
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	98,00	97,83	100,17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,00	97,91	100,09
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	99,00	99,31	99,69
		Pengadaan Kendaraan Dinas	100,00	87,10	114,81

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Operasional Atau Lapangan			
		Pengadaan Mebel	100,00	99,46	100,54
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	99,00	98,68	100,32
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	99,76	100,24
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	91,00	91,19	99,79
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97,00	96,80	100,21
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	92,00	92,38	99,59
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100,00	99,54	100,46
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	97,00	97,32	99,67
2	Program Pemberdayaan Sosial	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	99,00	98,75	100,25

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	87,00	87,38	99,57
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	98,00	98,48	99,51
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60,00	59,64	100,60
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	99,00	99,01	99,99
		Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K)	91,00	91,10	99,89
3		Penyediaan Pemakanan	0,00	0,00	0,00

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	67,00	66,86	100,21
		Penyediaan Alat Bantu	100,00	71,00	140,85
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	45,00	45,26	99,43
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial	78,00	77,78	100,28
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	27,00	27,26	99,05
		Pemberian Layanan Rujukan	46,00	45,64	100,79
		Penyediaan Pemakaman	31,00	31,40	98,73
		Penyediaan Sandang	8,00	7,65	104,58
		Penyediaan Alat Bantu	81,00	81,39	99,52
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20,00	20,00	100,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	36,00	36,15	99,59
		Pemberian Layanan Rujukan	33,00	33,47	98,60
		4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penjangkauan Anak – Anak Terlantar	92,00
Pendataan Fakir Miskin Cakupan	72,00			71,67	100,46

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	90,03	99,97
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	99,00	98,88	100,12
		Fasilitasi Bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat	99,00	99,18	99,82
		Penyediaan Makanan	36,00	35,87	100,36
		Penyediaan Sandang	39,00	38,95	100,13
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	95,00	94,88	100,13
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	78,00	77,81	100,24
5	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100,00	99,73	100,27
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92,00	91,64	100,39
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	98,00	98,03	99,97

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
	Hayati (KEHATI)				
Efisiensi			98,40	88,91	110,67

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 terdapat 23 kegiatan dengan nilai efisiensi persentase dibawah 100%, 25 kegiatan dengan nilai persentase efisiensi sebesar 100%, dan 3 kegiatan dengan nilai efisiensi persentase lebih dari 100%. Terdapat persentase efisiensi terbesar 140,85% pada kegiatan Penyediaan Alat Bantu.

3. Efektivitas

Elemen *value for money* ketiga adalah efektivitas, menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Dimana *outcome* merupakan angka realisasi hasil/keluaran kegiatan dan *output* merupakan angka rencana hasil/keluaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Berikut merupakan perhitungan elemen efektivitas pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
1	Program Pelayanan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1130 Surat	1600 Surat	71%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
	Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit	20 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28 Item	28 Item	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	44 Item	44 Item	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Item	8 Item	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Item	1 Item	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1456 Box	1510 Box	96%
		Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	127 Kali	160 Kali	79%
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	13 Orang	13 Orang	100%
		Penyediaan Jasa Sopir Kantor	9 Orang	9 Orang	100%
		Publikasi Informasi Pembangunan	4 Item	4 Item	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	26 Orang	26 Orang	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Item	1 Item	100%
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	3 Item	100%
		Pengadaan Mebelur	8 Item	8 Item	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 Item	4 Item	75%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22 Unit	20 Unit	110%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 Item	2 Item	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Orang	5 Orang	20%
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan Manajemen Pembangunan Sosial	5 Orang	5 Orang	100%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100%
5	Program Pemberdayaa	Peningkatan Sarana	303 Kk	220 Kk	138%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
	n Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH) Kecamatan Bengkalis dan Bantan			
		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupa dan Rupa Utara	180 Anak	180 Anak	100%
		Peningkatan Sarana Pemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT (PAH) Kecamatan Rupa dan Rupa Utara	190 Kk	190 Kk	100%
		Penyediaan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin	42 Orang	42 Orang	100%
		Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis	95%	95%	100%
		Penyediaan Kube Pertumbuhan	25 Kube	25 Kube	100%
		Penyaluran Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT)	13039 KPM	13039 KPM	100%
		Koordinasi Perumusan	13039 KPM	13039 KPM	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
		Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT)			
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	0 Orang	0 Orang	0%
		Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	60 Orang	34 Orang	176%
		Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal	86 Orang	130 Orang	66%
		Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia	150 Orang	150 Orang	100%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	116 Kk	400 Kk	29%
		Pemeliharaan Usia Lanjut Bedridden	80 Orang	80 Orang	100%
		Pelatihan Mengemudi Bagi	53 Orang	53 Orang	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektifitas (%)
		Eks Anak Bermasalah			
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Pinggir	148 Anak	148 Anak	100%
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bengkalis	63 Anak	43 Anak	147%
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bantan	58 Anak	38 Anak	153%
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Bukit Batu	43 Anak	43 Anak	100%
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Mandau	150 Anak	150 Anak	100%
		Seleksi dan Evaluasi Calon Orang Tua Angkat Dalam Proses Adopsi Anak	6 Pasang	10 Pasang	60%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Singgah PMKS	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)	100%	100%	100%
		Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Terlantar Di Kecamatan Batin Solapan	200 Anak	200 Anak	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial	100%	100%	100%
7	Program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pengiriman Klien Penyandang Cacat Yang Akan Mengikuti Pelatihan Keterampilan Di Panti Sosial Di Luar Provinsi	5 Orang	5 Orang	100%
		Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Kusta dan Penyakit Kronis	50 Orang	50 Orang	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
		Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda	40 Orang	40 Orang	100%
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pencegahan Korban Trafficking	32 Kasus	40 Kasus	80%
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Anak Punk dan Anak Jalanan	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH Oleh Daerah	95%	95%	100%
		Pengembangan Model LK3 Tentang Konseling Keluarga	29 Kunjungan Kasus	50 Kunjungan Kasus	58%
		Penguatan Kelembagaan K38	100%	100%	100%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	5 Unit	9 Unit	56%
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	23 TPU	23 TPU	100%
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	1 TMP	1 TMP	100%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Lembaga Kesos	1 Lembaga Kesos	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas (%)
		Penunjang Lembaga Kesejahteraan Sosial			
Efektivas					106,76%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.7, terdapat 13 kegiatan dengan nilai persentase efektivitas dibawah 100%, 43 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas sama dengan 100%, dan terdapat 5 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas lebih dari 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan efektivitas pada kegiatan di tahun 2021. Berikut perhitungan efektivitas kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2021.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19 Orang	17 Orang	112%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	21 Orang	20 Orang	105%
		Penyediaan Komponen	7 Item	4 Item	175%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektifitas (%)
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89 Item	89 Item	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2121 Kotak	3745 Kotak	57%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11 Item	9 Item	122%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	199 Eksemplar	6000 Eksemplar	3%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Kali	125 Kali	87%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	100%
		Pengadaan Mebel	12 Item	9 Item	133%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	14 Item	11 Item	127%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Orang	9 Orang	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 Orang	9 Orang	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	24 Unit	11 Unit	218%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	19 Orang	18 Orang	106%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	9 Item	8 Item	113%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	328 Anak	328 Anak	100%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	164 Orang	164 Orang	100%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	11 Orang	12 Orang	92%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
		Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	74 Orang	74 Orang	100%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3 LKS	4 LKS	75%
		Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K)	26 Kasus	30 Kasus	87%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	0 Box	500 Box	0%
		Penyediaan Sandang	15 Orang	40 Orang	38%
		Penyediaan Alat Bantu	74 Orang	75 orang	99%
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12 Orang	65 Orang	18%
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	30 Orang	55 Orang	55%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivasitas (%)
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6 Orang	19 Orang	32%
		Pemberian Layanan Rujukan	2 Orang	28 Orang	7%
		Penyediaan Permakanan	114 Box	350 Box	33%
		Penyediaan Sandang	4 Orang	40 Orang	10%
		Penyediaan Alat Bantu	54 Orang	54 Orang	100%
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8 Orang	40 Orang	20%
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	51 Orang	20%
		Pemberian Layanan Rujukan	3 Orang	55 Orang	5%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penjangkauan Anak – Anak Terlantar	434 Anak	434 Anak	100%
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36066 KPM	35460 KPM	102%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36066 KPM	35460 KPM	102%
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	12802 KPM	12860 KPM	100%
		Fasilitasi Bantuan pengembangan	63 Kelompok	59 Kelompok	107%

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas (%)
		Ekonomi Masyarakat			
		Penyediaan Makanan	931 Orang	4800 Orang	19%
		Penyediaan Sandang	298 Orang	30 Orang	993%
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	20013 Kk	21027 Kk	95%
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	27 Orang	35 Orang	77%
5	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	100%
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 TMP	1 TMP	100%
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	47 Orang	47 Orang	100%
Efektivitas					99,14%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.8, terdapat 21 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas dibawah 100%, 17 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas sama dengan 100%, dan 13 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas lebih dari 100%.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan ini akan menjelaskan maksud dari hasil penelitian terkait perhitungan masing – masing elemen *value for money*. Berikut merupakan pembahasan dari hasil perhitungan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan 2021.

1. Aspek Ekonomis

Pada tahun 2020 perhitungan ekonomis pada seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 97,12% dan pada tahun 2021 hasil perhitungan ekonomis adalah 88,91. Berdasarkan kriteria penilaian ekonomis yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dinyatakan ekonomis dan tahun 2021 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis juga dinyatakan ekonomis. Hasil perhitungan rasio ekonomis menunjukkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,21%. Meskipun terjadi penurunan namun jika dilihat dari segi ekonomis hal ini berarti bahwa pada tahun 2021 telah terjadi penghematan anggaran sebesar 8,21%.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan asumsi jika realisasi anggaran untuk tiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dijabarkan oleh suatu instansi pemerintah lebih besar dari pada anggaran yang telah ditetapkan maka rasio ekonomis akan semakin besar dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perhitungan ekonomis ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan 2021 adalah baik karena telah sesuai dengan

konsep ekonomis yaitu penghematan anggaran dalam melaksanakan program atau kegiatan suatu organisasi ataupun instansi. Persentase ekonomis dibawah 100% berarti Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

2. Aspek Efisiensi

Pada tahun 2020 perhitungan efisiensi pada seluruh program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 102,79%. Berdasarkan kriteria penilaian efisiensi yang telah ditetapkan maka pada tahun 2020 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dinyatakan efisien. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2021 dengan perhitungan efisiensi pada seluruh program/kegiatan yang dilakukan adalah sebesar 110,67% sehingga dapat dikategorikan efisiensi menurut kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan sebesar 7,88% hal ini berarti bahwa pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mampu menghemat dana untuk mendapatkan output yang maksimal.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan lebih besar dari penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya. Dengan asumsi apabila realisasi fisik yang telah dicapai oleh suatu instansi lebih besar dari pada realisasi keuangan yang ditetapkan maka rasio efisiensi yang dihasilkan akan semakin besar.

Dalam perhitungan efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah baik karena telah memenuhi konsep efisien yaitu menghasilkan output yang maksimal dengan input yang lebih rendah. Persentase efisiensi lebih dari 100% menunjukkan bahwa persentase fisik program/kegiatan yang telah dilaksanakan melebihi persentase keuangan yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya.

3. Aspek Efektivitas

Pada tahun 2020 perhitungan efektivitas pada seluruh program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 106,76%. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas yang telah ditetapkan maka pada tahun 2020 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dinyatakan efektif. Namun yang terjadi pada tahun 2021 dimana perhitungan rasio efektivitas adalah sebesar 99,14% dengan kriteria penilaian dinyatakan tidak efektif. Hasil perhitungan rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,62% yang berarti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan kinerja dalam mencapai target sasaran yang telah ditentukan.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut telah mencapai tujuan dari sasaran akhir yang ditetapkan. Dengan asumsi bila capaian kinerja yang dicapai lebih besar dari yang ditargetkan maka rasio efektivitas yang dihasilkan juga akan semakin besar dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perhitungan efektivitas pada tahun 2020 kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah baik dan 2021 kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tidak baik, karena pada tahun 2020 telah mencapai target atas program/kegiatan yang dilaksanakan namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dimana belum memenuhi kategori efektivitas yaitu pencapaian target atas program/kegiatan yang dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini merupakan organisasi sektor publik yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan - bantuan kepada masyarakat, maka dari itu untuk menilai suatu efektivitas perlu dilihat apakah bantuan - bantuan tersebut sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian efektivitas dibawah 100% menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran yang dilakukan tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang diharapkan oleh instansi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada bagian Pelayanan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan berita yang ditemukan terhadap Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis diketahui masih banyak masyarakat yang mengeluh akibat belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan). Hal ini didukung dari berita hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020 yang mana seharusnya dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Dapat dilihat dari perhitungan ketiga elemen *value for money* diatas bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 telah memenuhi prinsip *value for money* dan 2021 belum memenuhi prinsip *value for money*.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada simpulan ini berisikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini maka dinyatakan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis belum memenuhi prinsip *value for money* sebagaimana penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan ekonomis dengan persentase 97,12% dan tahun 2021 berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan ekonomis dengan persentase sebesar 88,91%.
2. Pada tahun 2020 berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan efisien dengan persentase 102,79% dan tahun 2021 berdasarkan program/kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan efisien dengan persentase sebesar 110,67%.
3. Pada tahun 2020 berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan efektif dengan persentase 106,76% dan tahun 2021 berdasarkan program/kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan tidak efektif dengan persentase sebesar 99,14%.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mengevaluasi kembali program dan kegiatannya agar dapat memenuhi elemen *value for money* sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari objek penelitian yang memiliki data yang lebih lengkap. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk lebih mendalami lagi informasi dan masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, C., Salle, A., & Rante, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68-82.
- Arinda, F. P (2021). Analisis *Value For Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Basri, Yesti Mutia. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Pekanbaru: Jurusan Akuntansi FE UR 2017.
- Dwinanda, Y. (2018, Mei). Analisis *Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Yogyakarta.
- Efriyanti, F., Anggraini, R., & Fiscal, Y. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Dasar Investor Dalam Menanamkan Modal Pada PT. Bukit Asam, TBK. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 299-316.
- Fitriah, Nur Khalifah (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Menggunakan Konsep *Value For Money*. Makasar.
- Halim, Abdul., & Muhammad Syam Kusufi (2018). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Hatta, Z., E. A (2021). Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau. *Journal Economics, Accounting and Business*. Vol. 1 No. 1, September, 198-211.
- Husna, N. A (2018) Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Periode 2017 – 2018. Sumatera Barat
- Indriyawati, M (2020). Analisis Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard* Pada Koperasi Simpan Pinjam Titian Umat Sejahtera. Semarang.
- Isna, Ardila (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Khalikussabir (2016). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan *Value For Money* (Studi Kasus pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo). Malang.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Mahsun, Muhamad (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Mahsun, Muhamad (2020). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Majid, Jamaludin (2019). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan I, November 2019. Sulawesi Selatan.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, edisi terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pratiwi, Amelia. I., & Nursandia, E. (2017, July 10). Analisis Pengukuran Kinerja *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 11.
- Putra, Ryan Pramana (2022). *Analisis Value For Money* pada kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Putri, N. Z. A. (2020). *Analisis Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur.
- Rahman, W. A (2021). *Analisis Value For Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Riau
- Rahmaprilia, V. D., & Wafaretta, V. (2021). Kinerja Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas Dinas Sosial Kabupaten Malang Sebelum dan Selama Pandemi. Malang.
- Rempowatu, J., & Tirayoh, V. (2016, Maret). Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2014. *Jurnal EMBA*, 4(1), 982-989.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. edisi ke 6. Penerbit: Alfabeta.
- www.antaraneews.com. (2020). *Berita Dinas Sosial*. Retrieved from antaraneews: <http://www.antaraneews.com/berita/2328558/ditemukan-bpk-ada-11-pns-di-bengkalis-riau-terima-bst-covid-19>.
- Yanti. N., Sudardjo, A., Putri, Y.A.P (2021). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2018). Sumatera Barat.

Pemerintah Indonesia 2003. Undang – Undang No.17 Tahun 2003 Yang Mengatur Tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Yang Mengatur Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau